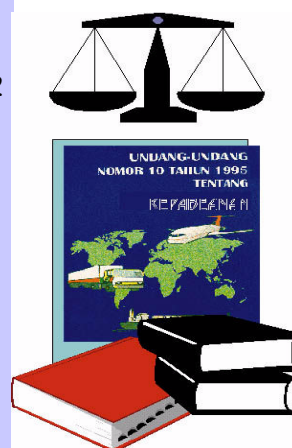


SELAMAT DATANG PADA SESI IMPOR DAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR



DASAR HUKUM

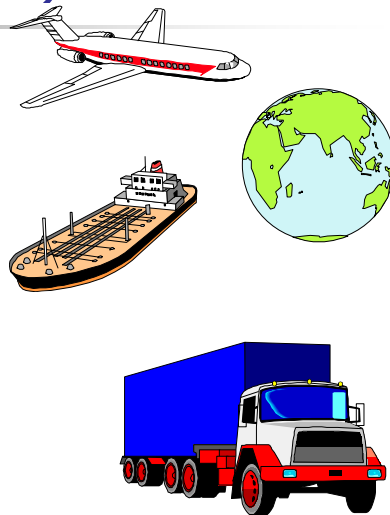
UU NO. 10 /1995 tentang Kepabeanan
UU No: 17/ 2006 ttg perubahan UU No:
10/1995 tentang Kepabeanan
SK Menteri Keuangan RI No. 453/04/2002
tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang
Impor
SK Dirjen BC No. 07/BC/2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana
Kepabeanan di Bidang Impor.
Peraturan DJBC No:P-25/BC/2007 ttg
Juklak KPU
Peraturan DJBC No: P-07/BC/2007
tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor
Peraturan DJBC No: 11/BC/2005 ttg Jalur
Prioritas jo No: P-06/BC/2006 tentang
perubahan P-11/BC/2005

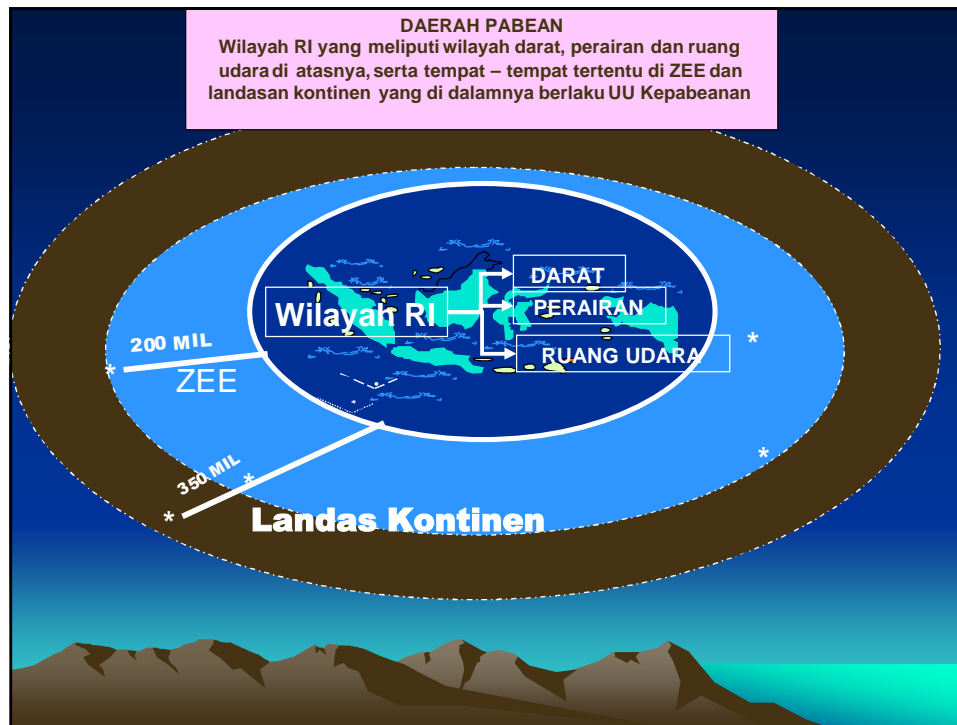


IMPOR

(UU No : 17/2006)

- KEGIATAN MEMASUKKAN BARANG KE DALAM DAERAH PABEAN (ps 1-13)
- BARANG YANG DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABEAN DIPERLAKUKAN SEBAGAI BARANG IMPOR DAN TERUTANG BEA MASUK (ps 2 - 1)





JENIS BARANG IMPOR

1. BARANG YANG DIATUR TATA NIAGANYA.
2. BARANG IMPOR YANG DIAWASI
3. BARANG YANG DILARANG
4. BARANG YANG BEBAS DIIMPOR


KENAPA DIATUR TATA NIAGANYA ?

- UNTUK PENGENDALIAN TERJADINYA PENYIMPANGAN GUNA MENGURANGI DAN ATAU MENGHINDARI DAMPAK NEGATIF YANG DITIMBULKAN
- CONTOH:
 - LIMBAH MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
 - BAHAN PELEDAK
 - MINYAK PELUMAS
 - BARANG MODAL BUKAN BARU

BARANG LARANGAN PEMBATASAN

- Barang larangan dan pembatasan impor adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan ke wilayah Republik Indonesia tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- Tujuan diberlakukannya peraturan larangan dan pembatasan dalam rangka memudahkan pelaksanaan pengawasan atas lalu lintas barang tersebut.
- Oleh karena itu untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis tersebut wajib memberi tahukan kepada Menteri Keuangan.

BARANG IMPOR DIAWASI ???

- 
1. Untuk melindungi konsumen, pelaku usaha dan negara yang berkaitan dengan aspek keamanan, kesehatan, pelestarian lingkungan dan moral bangsa dan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat
 2. Pengawasan dilakukan atas persyaratan teknis, termasuk persyaratan pengemasan, penyimpanan dan transportasi sesuai dengan SNI
 3. Dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran atas barang impor bersangkutan

KETENTUAN IMPOR



- **Barang yang diimpor harus baru.**
- **Impor hanya boleh dilakukan oleh pemegang API ; APIT atau API-P, (yaitu tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki oleh setiap importir) :**
- **kecuali untuk :**
 - **Barang pindahan**
 - **Barang impor sementara**
 - **Barang kiriman, hadiah , keperluan ibadah umum, keperluan amal sosial**
 - **Barang perwakilan asing dan tenaga ahli asing**
 - **Barang untuk keperluan badan internasional**
 - **Barang contoh**

Impor boleh tanpa API

Apabila :

- impor tidak dilakukan secara terus menerus dan yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau yang tidak dimaksudkan untuk dipindahtangankan; dan
- barang yang diimpor adalah barang untuk keperluan lainnya yang berupa alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan infrastruktur.
- Impor Tanpa API wajib memperoleh Persetujuan Impor yang ditandatangani Direktur Impor.

Beberapa pengertian

- API - U :
 - Diberikan kepada perusahaan dagang agar perusahaan tersebut dapat mengimpor barang – barang yang tidak diatur tata niaganya.
- API - P :
 - Diberikan kepada perusahaan industri , dipergunakan untuk impor barang tertentu keperluan proses produksi dan dapat juga untuk mengimpor barang – barang umum.
- API -T:
 - Hanya dapat dipergunakan untuk mengimpor barang keperluan proses produksi sendiri yang mendapatkan fasilitas BKPM dan diberikan kepada perusahaan Penanam Modal
- API-K wajib dimiliki oleh setiap Kontraktor KKS(kontrak kerja sama) yang melakukan impor.

Beberapa pengertian

- NPIK: (Nomor Pokok Importir Khusus)
 - Nomor pengenal khusus yang harus dimiliki oleh importir yang akan mengimpor barang – barang tertentu yaitu:
 - **Jagung, gula, kedelai; beras; mainan anak – anak; elektronika ,dan komponennya; tekstil, produk tekstil serta alas kaki.**
- NIK (Nomor Identitas Kepabeanan)
 - Nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh DJBC kepada importir yang melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi maupun manual.

**Registrasi importir
PERMENKEU
NO: 124/PMK.04/2007**

- Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Registrasi importir dilakukan oleh importir dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui media elektronik.
- Untuk kepentingan pengawasan, terhadap importir yang telah mendapat NIK sewaktu-waktu dapat dilakukan penelitian kembali oleh pejabat bea dan cukai atas kekurangan data pada formulir isian.
- Importir yang belum mendapatkan NIK, dapat dilayani pemenuhan kewajiban kepabeanannya untuk 1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor pabean.

**REGISTRASI IMPORTIR
(CARA)**

- Importir mengajukan permohonan ke Dirjen BC dengan formulir via media elektronik
- Ditjen BC menguji kebenaran :
 - Eksistensi
 - ID pengurus dan penanggung jawab
 - Jenis usaha
 - Kepastian penyelenggaraan pembukuan
- Direktur Jenderal dapat menerima atau menolak permohonan registrasi importir dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian secara lengkap dan benar.
- NIK diblokir dalam hal :
 - Eksistensi tidak sesuai dengan pemberitahuan
 - ID pengurus dan penanggung jawab tidak sesuai dengan pemberitahuan
 - Tidak menyelenggarakan pembukuan
 - API/APIT habis masa berlakunya

Ketentuan umum

- Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk (ps 2 (1) UU No: 10 /1995)
- Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean (Ps 5 (1) UU No: 10/1995).
- Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.
- Untuk membayar Bea Masuk Importir harus membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

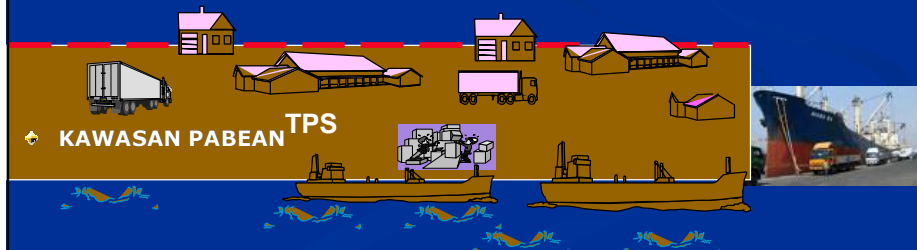
Kedatangan sarana pengangkut

- Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:
- luar daerah pabean; atau dalam daerah pabean yang mengangkut:
 - barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,
- wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat
- Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang – barang tersebut kedalam manifestnya.



Kedatangan Barang Impor

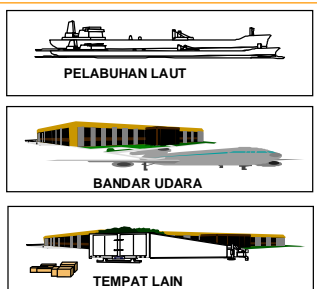
- Barang impor wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean.
- Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara.
- Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara.



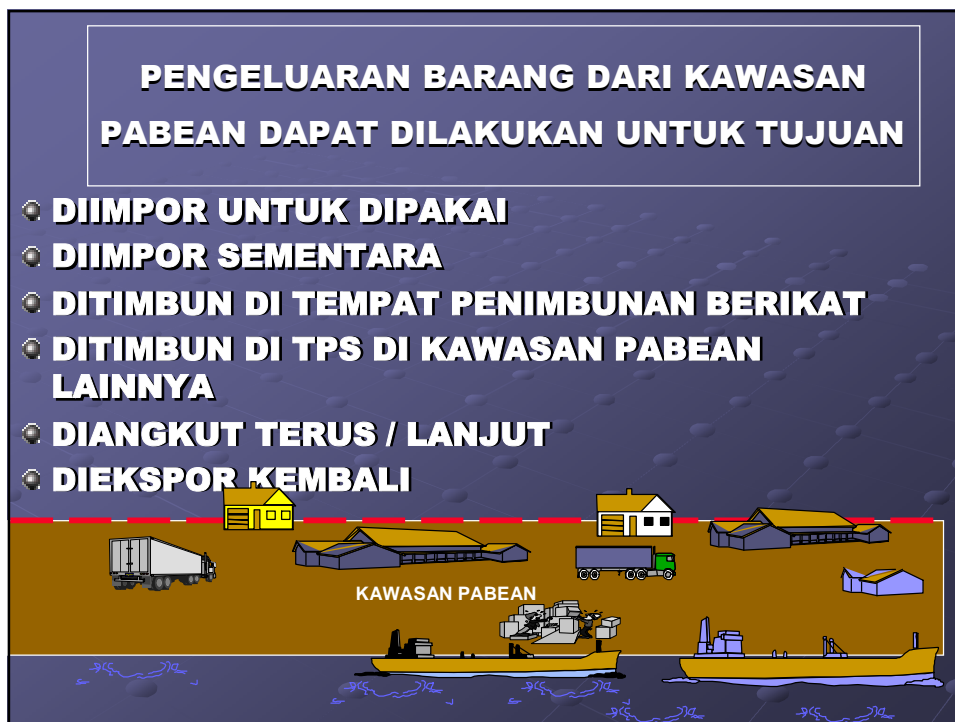
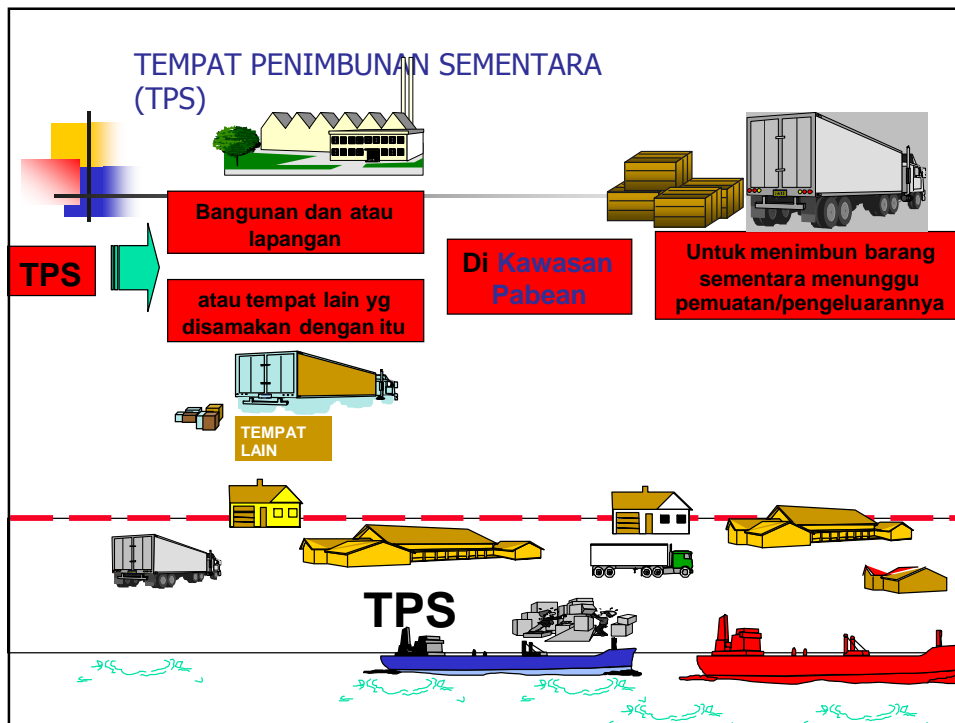
KAWASAN PABEAN



PENGAWASAN



KAWASAN PABEAN
adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut,
bandar udara, atau tempat lain
yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang
yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



IMPOR UNTUK DIPAKAI

- MEMASUKKAN BARANG KE DAERAH PABEAN DENGAN TUJUAN UNTUK DIPAKAI
- MEMASUKKAN BARANG KE DALAM DAERAH PABEAN UNTUK DIMILIKI ATAU DIKUASAI OLEH ORANG YANG BERDOMISILI DI INDONESIA



PEMBERITAHUAN PABEAN PENGELUARAN BARANG IMPOR

- **Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai, wajib menggunakan PIB,**
- **kecuali untuk :**
 - barang pindahan ;
 - barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang;
 - barang impor melalui jasa titipan ;
 - barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
- **digunakan PIBK(Pemberitahuan Impor Barang Khusus)**
 - barang penumpang dan awak sarana pengangkut ,
- **digunakan dokumen Customs Declaration (CD);**
 - barang kiriman melalui PT. (Persero) Pos Indonesia ;
- **digunakan (PPKP) Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos**
 - barang impor pelintas batas;
- **digunakan Buku Pas Barang Pelintas Batas**

Pengeluaran barang impor Untuk dipakai

- **PIB :**
 - **Dibuat oleh importir atau PPJK**
 - **Dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabean**
 - **Importir atau PPJK menghitung sendiri BM, Cukai dan PDRI yang harus dibayar**
- **Penyampaian PIB :**
 - **dilakukan setiap pengimporan ;**
 - **atau secara berkala**
- **Untuk KPPBC yang sudah menerapkan sistem PDE, disampaikan melalui komputer yang on-line dengan sistem PDE Kepabeanan.**
- **Kecuali IJP, berkas PIB dan bukti pembayaran disampaikan ke KPPBC.**



■ PEMBUATAN PIB

- Dengan menggunakan program aplikasi modul PIB importir/PPJK, menyiapkan dan mengisi PIB secara lengkap dan benar dengan mencantumkan:
- nomor surat persetujuan/izin yang diterbitkan oleh instansi teknis dalam hal importasi memerlukan perijinan / rekomendasi;
- nomor dan tanggal bukti pembayaran dan/atau bukti penerimaan jaminan/STTJ;
- nomor dan tanggal surat keputusan tentang pemberian fasilitas kepabeanan, jika ada;
- nomor dan tanggal manifes (BC 1.1) dan nomor pos-nya kecuali mendapatkan izin pre-notification;



DOKUMEN PELENGKAP PABEAN

- Dokumen Pelengkap Pabea adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabea all:
 - Sales contract
 - Purchases order
 - invoice
 - L/C
 - packing list
 - bill of lading/airway bill,
 - manifest dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

Pembayaran bea masuk

- Pembayaran bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor dapat dilakukan dengan cara:
 - pembayaran tunai; atau
 - pembayaran berkala.
- Pembayaran tunai wajib dilakukan paling lambat pada saat PIB didaftarkan.
- Pembayaran berkala diberikan kepada importir yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Penyampaian PIB

- Penyampaian PIB untuk setiap pengimporan dilakukan setelah pengangkut menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya.
- PIB dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan diatas formulir.
- PIB dalam bentuk data elektronik dapat disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan atau menggunakan media penyimpan data elektronik.

BERAPA BESARNYA BEA MASUK
YANG HARUS DIBAYAR ?

Bea masuk =
 $\text{Tarif BM} \times \text{CIF} / \text{C\&F} \times \text{NDPBM}$

- Besarnya tarif = berdasarkan BTBMI
 - Nilai pabean = Nilai transaksi barang impor
 - Freight = yang sebenarnya dibayar
 - Asuransi :
 - bisa di bayar di luar negri
 - bisa di bayar di dalam negri
 - diperhitungkan sebesar $0,5\% \times \text{C\&F}$
- NDPBM berlaku:
 - pada saat dilakukan pembayaran, atau
 - diserahkan jaminan bea masuk; atau
 - pendaftaran PIB di KPPBC dalam hal mendapat pembebasan atau pembayaran berkala



Rumus Perhitungan
BM & PDRI

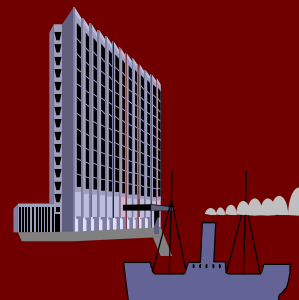
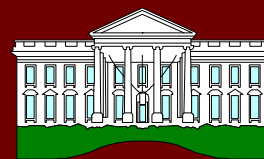
- $\text{Bea Masuk} = \text{TARIF} \times (\text{NP} \times \text{NDPBM})$
- $\text{PPN} = \text{TARIF} \times \{ \text{BM} + (\text{NP} \times \text{NDPBM}) \}$
- $\text{PPn BM} = \text{TARIF} \times \{ \text{BM} + (\text{NP} \times \text{NDPBM}) \}$
- $\text{PPh PS 22} = \text{TARIF} \times \{ \text{BM} + (\text{NP} \times \text{NDPBM}) \}$

CONTOH

- Harga CIF USD 18.000,-
- NDPBM = 1 USD = Rp 10.000,-
- BM = 10%; PPN = 10% ; PPh = 2,5%
- $BM = 10\% \times (Rp\ 18.000,- \times Rp\ 10.000)$
= Rp 18.000.000,-
- $PPN = 10\% \times \{ Rp\ 18.000.000 + (Rp\ 10.000,- \times 18.000) \} = Rp19.800.000,-$
- $PPh = 2,5\% \times \{ Rp\ 18.000.000 + (Rp10.000 \times 18.000) \} = Rp\ 4.950.000$

PEMBAYARAN BEA MASUK; CUKAI & PDRI

- Pembayaran di :
 - Di Bank Devisa Persepsi yang online dengan sistem PDE Kepabeanan
 - KPPBC atau Kantor Pos Persepsi
- Pembayaran Biasa atau Berkala (Prioritas atau Berkala)
- Tanda terima :
 - SSPCP (surat setoran pabean cukai dan pajak dlm rangka impor)
 - BPPCP (bukti pembayaran pabean, cukai dan pajak)



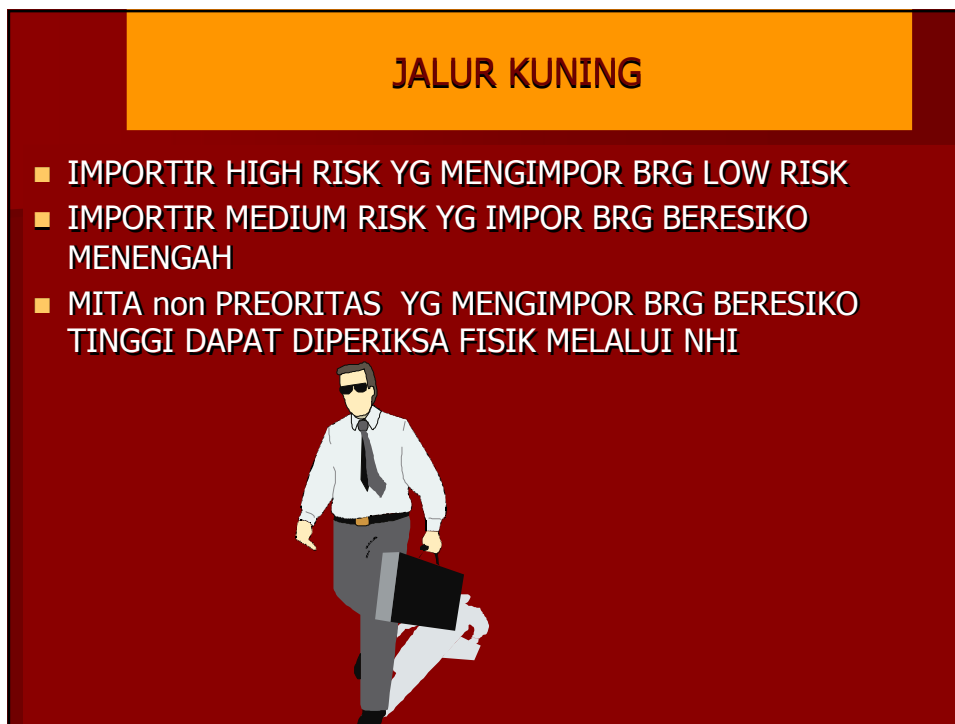
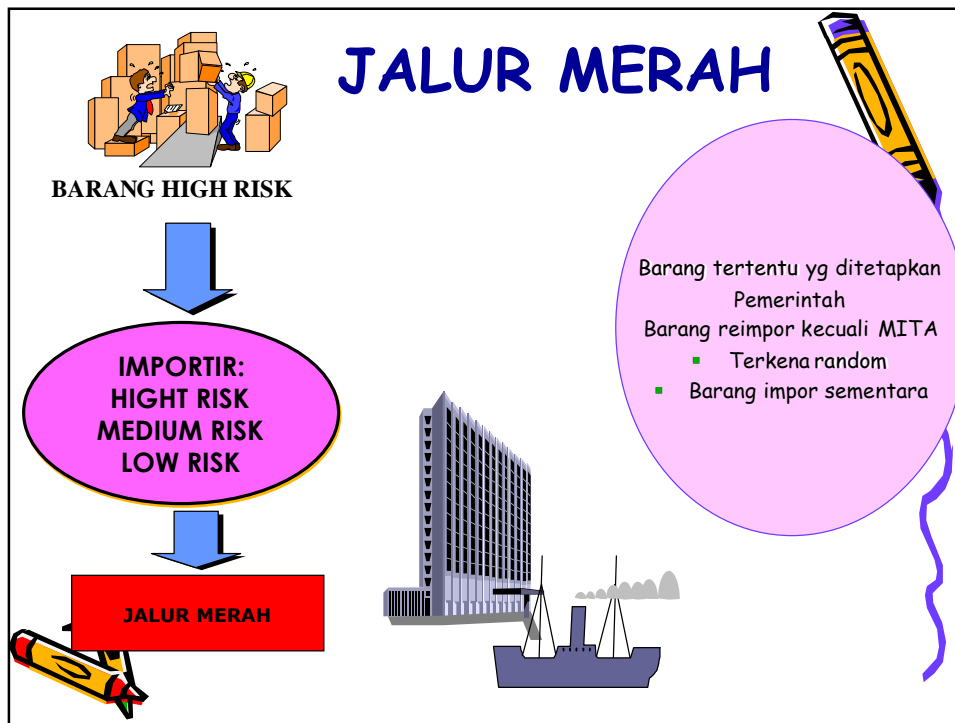


🌟 penetapan jalur



PENETAPAN JALUR

- BERDASARKAN KRITERIA YG DITENTUKAN OLEH SISTEM APLIKASI.
 - PROFIL IMPORTIR, dan atau
 - PROFIL KOMODITI
- JALUR MERAH
- JALUR KUNING
- JALUR HIJAU
- JALUR MITA

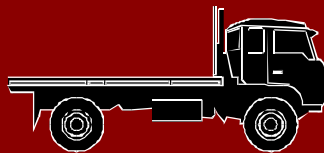


JALUR HIJAU

- Mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada :

- Importir *Medium Risk* yang mengimpor komoditi berisiko rendah
- Importir *Low Risk* yang mengimpor komoditi berisiko rendah atau menengah

hanya pemeriksaan dokumen



PEMERIKSAAN PABEAN

- Brg hanya dpt dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain dlm pengawasan Pabean setelah dilakukan pemeriksaan pabean dan diberikan persetujuan
- Pemeriksaan Pabean meliputi pemeriksaan fisik barang (secara selektif) dan pemeriksaan dokumen
- Barang impor berupa Barang Kena Cukai wajib dilekati Tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai
- Barang yang diimpor importir medium & high risk dilakukan pemeriksaan mendalam(fisik, HS, NP & Persyaratan impor)



TUJUAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

- UNTUK MENGETAHUI JUMLAH, JENIS BRG IMPOR GUNA MENETAPKAN KLASIFIKASI & NILAI PABEAN DENGAN BENAR.
- MENCEGAH :
 - URAIAN BARANG YG TIDAK JELAS
 - ADANYA BRG YANG TIDAK DIBERITAHUKAN
 - KESALAHAN PEMBERITAHUAN NEGARA ASAL
 - ADANYA BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN



PEMERIKSAAN FISIK

- DI LAPANGAN / GUDANG YANG ADA DI: TPS; TPP; TPB
- DIGUDANG IMPORTIR
- MELALUI HIGH - CO SCAN X RAY CONTAINER UNTUK :
 - BARANG SEJENIS atau
 - REFRIGERATED CONTAINER



PEMERIKSAAN FISIK

- ATAS DASAR PACKING LIST
- DITENTUKAN BERDASARKAN :
 - KEMASAN DALAM PETI KEMAS
 - KEMASAN NON PETI KEMAS
 - BULK ATAU CURAH
 - KEMASAN BERNOMOR & TIDAK BERNOMOR

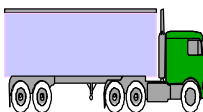


✦ PACKING LIST

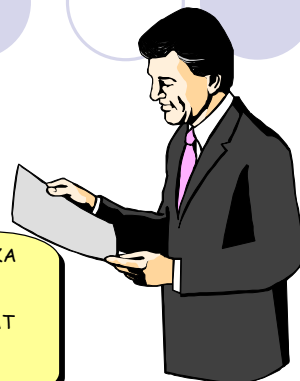
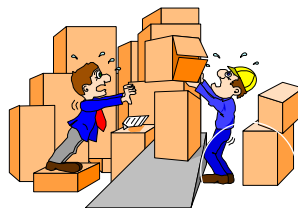


PEMERIKSAAN FISIK

SISTIM APLIKASI PELAYANAN KEPABEANAN MENENTUKAN :
 ✓JML & NO PETI KEMAS
 ✓TINGKAT PEMERIKSAAN



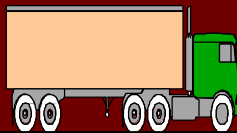
•NO & JML KEMASAN DLM RANGKA PENETAPAN KLASIFIKASI DAN NILAI PABEAN
 •JML MAKSIMAL SESUAI TINGKAT PEMERIKSAAN (10%;30%;100%)



PFPD atau KASI PAB

PEMERIKSAAN FISIK BARANG DALAM PETI KEMAS

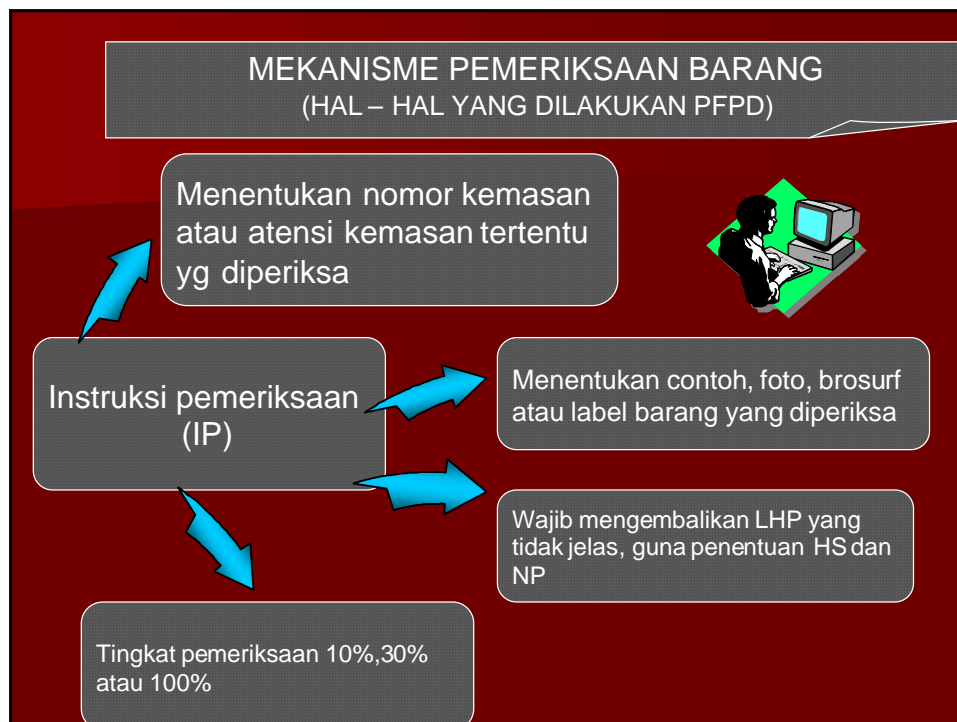
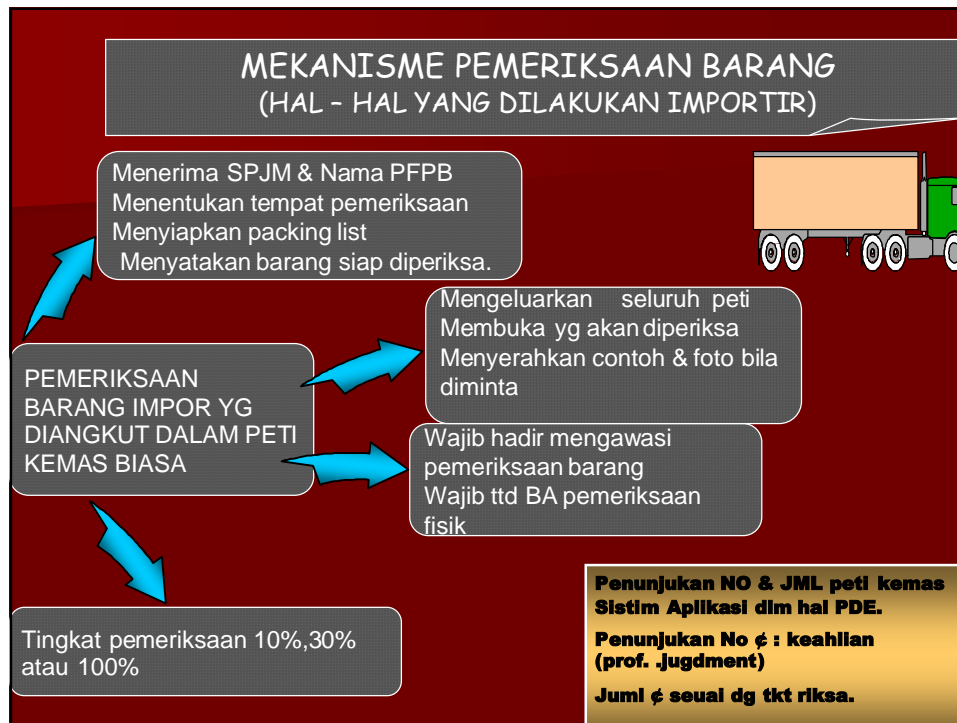
- TINGKAT PEMERIKSAAN 10% ATAU 30%:
 - PETIKEMAS 5 ATAU KURANG:
 - JUMLAH YG DIPERIKSA 10% atau 30% dan MINIMAL 2 PETI KEMAS
 - PETI KEMAS LEBIH DARI 5 :
 - JUMLAH YANG DIPERIKSA 10% atau 30% dan MINIMAL 1 PETI KEMAS

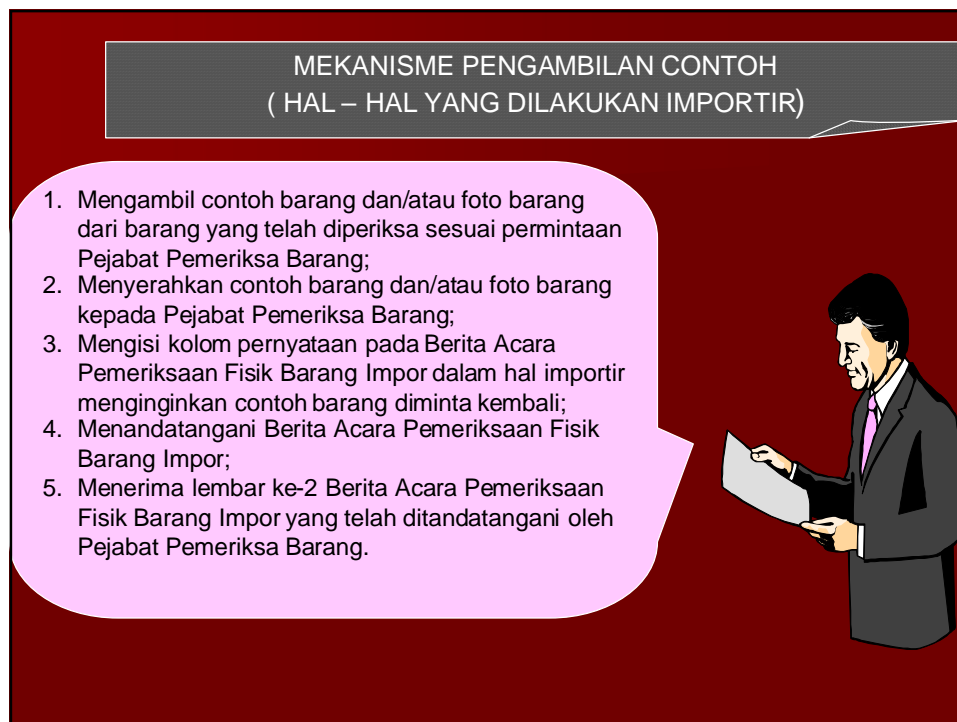
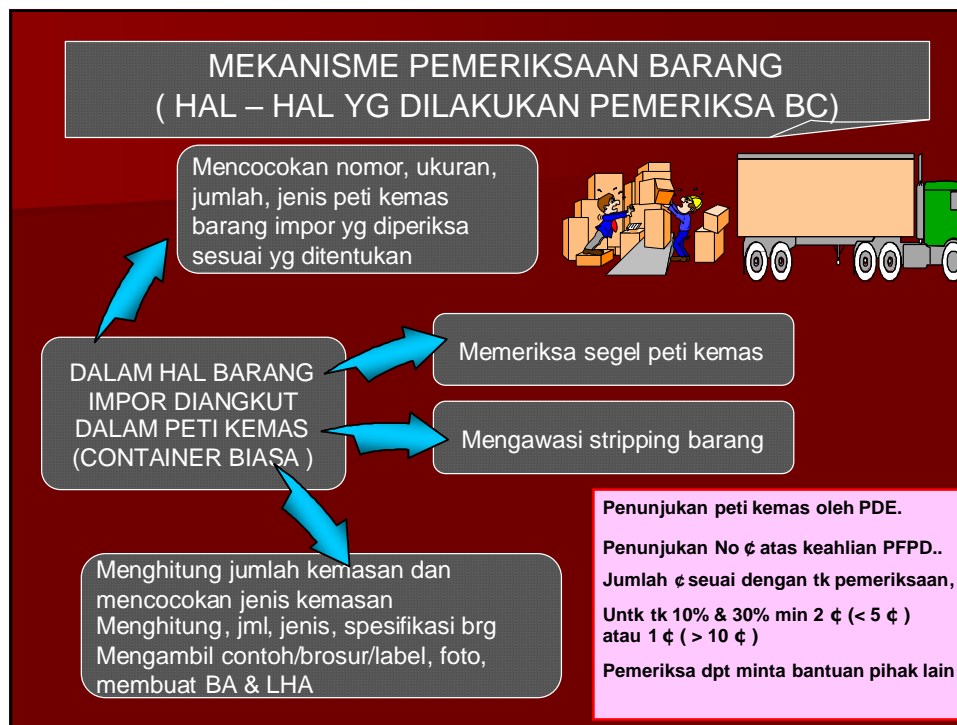


PEMERIKSAAN BARANG

- YANG DIKEMAS DALAM KEMASAN BUKAN PETI KEMAS :
 - TINGKAT PEMERIKSAAN 10 % & 30% :
 - PEMERIKSAAN 10 % ATAU 30% DARI SELURUH KEMASAN DAN MINIMAL 2 KEMASAN
- PEMERIKSAAN 100% APABILA:
 - PEMERIKSAAN JABATAN
 - TERKENA NHI
 - BARANG DALAM BENTUK CURAH
- PEMERIKSAAN DITINGKATKAN MENJADI 100% DALAM HAL:
 - JML ATAU JENIS BRG DLM PACKING LIST TIDAK JELAS
 - TIDAK DIKEMAS DLM KEMASAN YG BERNOMOR
 - JML DAN ATAU NOMOR KEMASAN TIDAK SESUAI DENGAN PACKING LIST
 - JML DAN ATAU JENIS BRG YANG DIPERIKSA TIDAK SESUAI DENGAN PACKING LIST







• KOP SURAT
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

• BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

1. Nomor : Tanggal:
2. Terhadap impor barang dengan data sebagai berikut :
3. No/Tgl PIB : / /200..
4. Lokasi Pemeriksaan :
Tgl/waktu penunjukan pemeriksa: .../ /200 :
waktu pemeriksaan :
a) Jam/tgl dimulai pengeluaran kemasan
b) Jam/tgl selesai pengeluaran kemasan
c) jam / tgl dimulai pemeriksaan barang
d) jam/tgl selesai pemeriksaan barang
1. Foto
2. Contoh barang
a) jenis
b) jumlah
c) diminta kembali oleh importir/kuasanya ya/tidak
3. Kendala pemeriksaan
4. a) Importir/kuasanya tidak ada di tempat pemeriksaan:
5. b) Barang tidak berada di tempat pemeriksaan :
6. c) Buruh tidak siap :
7. d) Peralatan tidak tersedia :
8. e) Lain-lain
9.
10. 8. Keterangan :
- Mengetahui: Pejabat Pemeriksa Barang Importir/Kuasanya*
- NIP Pengusaha TPS**

